Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]
Vol. 6, No.3, Mei 2024, Hal. 392-402
ISSN: 2808-6686

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN DENGAN METODE VALUE FOR MONEY PADA KANTOR DESA KEPENGHULUAN KENCANA KECAMATAN BALAI JAYA ROKAN HILIR

[1]Devi Tri Rahmadani

[1]Program Studi Akuntansi, [1]Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

[1]Email: devitrirahmadani273@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laporan keuangan di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana berdasarkan metode value for money. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa Laporan Realisasi APBDes di Kepenghuluan Kencana selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan menggunakan value for money sebagai indikator kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kantor Desa Kepenghuluan Kencana jika diukur dari rasio ekonomis kurang ekonomis dikarenakan berada di bawah rata-rata nilai persentase yang telah ditetapkan yaitu 100 persen ke atas. Begitu juga jika diukur dengan

Kata Kunci: *Laporan Keuangan, Value for Money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas*

I. PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya (Sinambela & Pohan, 2016). Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi untuk memantau kinerja Pemerintah Desa di dalam mengelola keuangan desa. Dengan harapan Pemerintah Desa di dalam pengelolaan keuangan desanya tersebut dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk memajukan dan mengembangkan desanya. Karena kemajuan sebuah negara bergantung kepada kemajuan desa itu sendiri. Pada era globalisasi ini, seluruh masyarakat Indonesia tidak dapat disebut sebagai anggota masyarakat dunia, karena di mana Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk terus berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, paradigma dasar pemerintahan perlu diubah dari sistem lama yang sepenuhnya terpusat di mana pemerintah pusat fokus pada pembuatan kebijakan. Paradigma baru tersebut membutuhkan sistem yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan memungkinkan daerah untuk bersaing secara lokal, domestik, dan internasional.

Desa adalah badan kolektif dari semua kegiatan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan desa yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini mengatur manajemen dari keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Seperti yang kita pahami, bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah pemilihan program atau kegiatan yang didahulukan dari pilihan kegiatan lain yang didanai oleh dana desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu rencana kegiatan pembangunan desa untuk periode tertentu. Dari 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa), yaitu penyusunan RPJM Desa selama 1 tahun. APBDes itu sendiri merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai manajemen desa kepada masyarakat dan pemerintah berupa informasi dalam menggambarkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di lingkungan desa berupa pelaksanaan rancangan program yang dibiayai dengan uang desa. Proses penganggaran akan dialokasikan pada kegiatan desa sehingga hasil perumusan strategi ataupun perencanaan yang dibuat akan sesuai dengan pertanggungjawaban desa.

Menurut Maith (2013) laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan, dapat juga digunakan untuk menilai prestasi yang dicapai perusahaan pada saat lampau, sekarang dan rencana pada waktu yang akan datang. Laporan keuangan umumnya disajikan untuk memberi informasi

mengenai posisi-posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan. Penilaian tingkat keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik dapat dilakukan berbagai analisa, salah satunya adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan membutuhkan laporan keuangan selama sedikitnya 2 (dua) tahun terakhir dari berjalannya perusahaan. Laporan keuangan desa dibuat untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh desa selama periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah desa terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran tertentu, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah desa, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan yang di buat (Anggraini, 2015).

Menurut Mardiasmo (2018, hal 5) value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik dengan berdasar pada tiga komponen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah perbandingan input dengan input value dalam satuan nilai rupiah. Efisiensi adalah perbandingan output dengan input berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara outcome (hasil) dengan output (keluaran). Dengan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang telah berjalan sesuai sistem kinerja organisasi dan berpusat pada tujuan yang jelas, maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah yang diimbangi perkembangan kualitas sumber daya yang ada. Value for money dalam suatu organisasi dapat tercapai apabila dalam penggunaan biaya masukan (input) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran (output) yang optimum dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu. Pengelolaan semacam ini berorientasi pada kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan, keputusan, rencana, dalam pelaksanaan program-program yang telah ditentukan. Value for money diharapkan mampu melakukan evaluasi kinerja yang baik berkaitan dengan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap tahunnya.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan ini menjadi salah satu Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang utama karena anggaran pemerintahan adalah tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran ini mempunyai peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja (Sinambela et al., 2018). Berdasarkan jumlah Anggaran dan Realisasi Dana Desa di Kepenghuluan Kencana yang diterima tidaklah sama setiap tahunnya. Penerimaan Dana Desa di Kepenghuluan Kencana selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami naik turun yang diikuti dengan naik turunnya yang terjadi pada belanja desa. Dengan adanya peningkatan dan penurunan tersebut membuat anggaran tidak baik. Pada tahun 2020 dan 2022 belanja desa yang dimiliki Kepenghuluan Kencana melebihi dari jumlah pendapatan yang ada, ini berarti terjadinya defisit dalam anggaran belanja yang artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Peningkatan dan penurunan pada anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan tidak semua dimanfaatkan oleh desa. Apabila pengelolaan

dana desa efisien maka itu dapat dioptimalkan untuk membangun desa. Pemerintah wajib melakukan perencanaan dengan baik mengingat sumber daya dan potensi pemerintah dalam penyelenggaran urusan wajib yang terbatas. Pada Kepenghuluan Kencana juga terdapat permasalah lain yaitu kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pelaporan anggaran, adanya isu penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pembangunan, dan sarana informasi laporan yang diberikan tidak bersifat continue. Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana yang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang sebagian besar masyarakatnya mengandalkan usaha pertanian dan peternakan. Peneliti memilih objek penelitian ditempat tersebut karena akan meneliti mengenai pelaporan keuangan dana desa yang ada di Kepenghuluan Kencana, untuk mengetahui bagaimana pelaporan berdampak terhadap kinerja keuangan karena semakin baiknya pelaporan keuangan dalam pengelolaan dana desa yang ada maka semakin transparan dan efisien dalam menekan laju pengeluarannya. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul analisis laporan keuangan pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Temuan Januri (2021) menegaskan bahwa pengendalian intern dan pengelolaan keuangan yang baik sangat menentukan efektivitas dan efisiensi organisasi, sehingga analisis ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai kinerja keuangan desa.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Ritonga (2022) penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atau objek yang diteliti. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti mencoba menganalisis mengenai pelaporan keuangan yang ada pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022. Jenis data dalam penelitian menggunakan data yang berasal dari dokumen laporan Keuangan Realisasi pelaksanaan APBDes di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana tahun 2018-2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2019 hal 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018-2022 pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari catatan yang dimiliki pemerintah desa.

Teknik ini dilaksanakan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen ataupun berbentuk foto yang diperlukan sebagai bahan informasi serta membuat fotocopy atau pencatatan dari arsip resmi yang dimiliki pemerintah desa yang sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengambil data dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018-2022. Penelitian ini

menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu yang dilakukan dengan cara menganalisis, menggambarkan, serta menjelaskan data yang diperoleh mengenai perusahaan yang diteliti. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan data-data keuangan yang berhubungan dengan penelitian seperti data laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018-2022, melakukan analisis kinerja pada laporan keuangan di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana dengan menggunakan metode Value for Money tahun 2018-2022, dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

III. HASIL PENELITIAN

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Terbentuk sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Kabupaten Rokan Hilir terbagi atas 18 kecamatan, dan terbagi lagi atas 83 Kelurahan/Desa atau di Kabupaten Rokan Hilir yang disebut dengan istilah Kepenghuluan. Kepenghuluan Kencana merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Pada tahun 1987 Kepenghuluan Kencana hanya merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi yang luas 832 Ha, pada tahun 1988 menjadi dusun Riau yang merupakan wilayah dari Desa Pasir Putih Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis dan pada tahun 1989 menjadi Desa Persiapan Kencana dengan luas wilayah menjadi 956 Ha dengan jumlah penduduknya meliputi 2097 jiwa. Kepenghuluan Kencana terdiri dari dua dusun yaitu dusun Karya Mulya dan Dusun Karya Mukthi. Seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan ekonomi, maka pada tahun 1996 menjadi Desa Definitif dengan Kepala Desa Bapak Tulus Sucipto dan menjadi bagian dari Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Visi di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana untuk mencapai tujuan di masa depan adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mewujudkan Kepenghuluan Kencana yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat, dengan rasa persatuan dan berasas gotong royong. Misi yang digunakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyelanggaraan lainnya; meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tahap kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan; bekerja sama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat; mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di Kepenghuluan Kencana seperti BPKep, PKK, Taruna, Koni, PAUD, TK, PDT, LPMD dan lembaga lainnya. Dengan adanya visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa Kantor Desa Kepenghuluan Kencana menjadi organisasi dengan sistem anggaran kinerja. Menurut Mardiasmo (2013), sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup tujuan dan penyusunan program serta tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Tahap perencanaan dalam mempersiapkan anggaran sangat penting dilakukan, karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja yang cenderung tidak terbatas. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money atau pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan dan cenderung boros (over spending). Value for money merupakan inti dalam pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada 3 rasio, yaitu ekonomis yang artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien yang artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan efektivitas yang artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (spending less) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomis merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Pada pengukuran tingkat ekonomis yaitu tingkat biaya yang dikeluarkan suatu organisasi untuk melakukan suatu pelayanan kepada publik. Tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah sehingga mendapat persentase tingkat pencapaiannya. Dalam mengukur tingkat ekonomis pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana, penelitian ini menggunakan rumus realisasi biaya dibagi anggaran biaya dikali 100 persen. Hasil perhitungan menunjukkan tahun 2018 sebesar 73,02 persen, tahun 2019 sebesar 69,17 persen, tahun 2020 sebesar 83,09 persen, tahun 2021 sebesar 78,55 persen, dan tahun 2022 sebesar 80,15 persen. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, nilai 60 persen sampai 80 persen termasuk kurang ekonomis dan 80 persen sampai 90 persen termasuk cukup ekonomis. Dengan demikian, rasio ekonomis Kantor Desa Kepenghuluan Kencana pada tahun 2018 sampai 2022 berada pada kategori kurang ekonomis dan cukup ekonomis.

Rasio efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Kegiatan operasional yang dilakukan bisa dikatakan efisien apabila hasil kerja tertentu dapat dicapai sesuai target yang ingin dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin. Akan tetapi dengan adanya sisa anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat menunjukkan bahwa suatu organisasi masih belum merealisasikan semua program yang telah direncanakan. Dalam mengukur tingkat efisiensi pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana, penelitian ini menggunakan rumus realisasi biaya dibagi realisasi pendapatan dikali 100 persen. Hasil perhitungan menunjukkan tahun 2018 sebesar 93,29 persen, tahun 2019 sebesar 90,89 persen, tahun 2020 sebesar 108 persen, tahun 2021 sebesar 90,73 persen, dan tahun 2022 sebesar 104 persen. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, nilai 90 persen sampai 100 persen termasuk kurang efisien dan di atas 100 persen termasuk tidak efisien. Dengan demikian, rasio efisiensi Kantor Desa Kepenghuluan Kencana pada tahun 2018 sampai 2022 berada pada kategori kurang efisien dan tidak efisien.

Pengukuran tingkat efektivitas dinilai efektif apabila suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Dalam mengukur tingkat efektivitas pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana, penelitian ini menggunakan rumus realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100 persen. Hasil perhitungan menunjukkan tahun 2018 sebesar 77,15 persen, tahun 2019 sebesar 72,12 persen, tahun 2020 sebesar 83,05 persen, tahun 2021 sebesar 84,14 persen, dan tahun 2022 sebesar 79,64 persen. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, nilai 60 persen sampai 80 persen termasuk kurang efektif dan 80 persen sampai 90 persen termasuk cukup efektif. Dengan demikian, rasio efektivitas Kantor Desa Kepenghuluan Kencana pada tahun 2018 sampai 2022 berada pada kategori kurang efektif dan cukup efektif.

IV. PEMBAHASAN

Dilihat dari hasil perhitungan pada rasio ekonomis di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu untuk rasio ekonomis tahun 2018 pada rasio perhitungannya sebesar 73,02 persen dengan kriteria kurang ekonomis karena berada di antara 60 persen sampai 80 persen, hal ini menunjukkan bahwa pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana menunjukkan kinerja yang kurang baik, dan dalam pengelolaan anggaran pemerintah desa belum sepenuhnya merealisasikan anggarannya untuk program atau kegiatan yang ingin dicapai. Pada tingkat pencapaian di tahun 2019 sebesar 69,17 persen dengan kriteria kurang ekonomis karena berada di antara 60 persen sampai 80 persen, hal ini berarti rasio ekonomis pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,85 persen dari tahun 2018. Hal ini berarti pada Pemerintah Kepenghuluan Kencana belum dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dan belum dapat menghindari pengeluaran yang boros.

Pada tahun 2020 perhitungan rasio ekonomis sebesar 83,09 persen sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada di antara 80 persen sampai 90 persen. Artinya rasio ekonomis di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 13,92 persen. Hal ini menunjukkan pada pelaksanaan anggaran pemerintah di Kepenghuluan Kencana belum mampu melakukan penghematan dalam merealisasikan anggaran dalam melaksanakan program-program atau kegiatan yang hendak dicapai. Pada tahun 2021 perhitungan rasio ekonomis sebesar 78,55 persen termasuk dalam kategori kurang ekonomis karena berada di antara 60 persen sampai 80 persen, ini berarti pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 4,54 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada kinerja Pemerintah Kepenghuluan Kencana kurang baik, karena pada tahun 2021 tersebut belum memenuhi kategori ekonomis yaitu pada penghematan anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. Persentase ekonomis di atas 100 persen berarti Pemerintah Kepenghuluan Kencana telah mengeluarkan dana lebih dari anggaran yang ditetapkan. Pada tahun 2022 perhitungan rasio ekonomis sebesar 80,15 persen sehingga termasuk dalam kategori cukup ekonomis karena berada di antara 80 persen sampai 90 persen. Yang artinya rasio ekonomis di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,6 persen, namun walaupun terjadi peningkatan masih berada dalam kategori cukup ekonomis. Dalam perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja Pemerintah

Kepenghuluan Kencana adalah kurang baik karena pada tahun 2022 belum memenuhi kategori ekonomis yaitu penghematan anggaran dalam melaksanakan kegiatannya. Pada rasio ekonomis sering disebut juga penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak adanya pemborosan serta tepat guna. Dengan semakin besar persentase ekonomis, maka kinerja keuangan suatu perusahaan akan semakin baik (Mahsun, 2016). Temuan ini sejalan dengan pandangan Hanum (2011) yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat untuk mencapai kinerja keuangan yang optimal.

Dilihat dari hasil perhitungan untuk rasio efisiensi di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana yang diukur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu untuk tingkat efisien pada rasio efisiensi tahun 2018 rasio perhitungannya yaitu sebesar 93,29 persen sehingga berada pada kategori kurang efisien karena berada di bawah 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan seminimum mungkin untuk mencapai target yang maksimum. Pada tingkat pencapaian di tahun 2019 perhitungan rasio efisiensi sebesar 90,89 persen termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada antara 90 persen sampai 100 persen, ini berarti pada rasio efisiensi tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,4 persen dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan yaitu dalam pelaksanaan anggaran belanja belum cukup baik untuk memenuhi syarat efisiensi dengan melakukan penghematan dana untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun hal ini perlu diambil langkah agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang lebih baik guna mensejahterakan masyarakat.

Pada tahun 2020 perhitungan rasio efisiensi sebesar 108 persen sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena rasionya lebih dari 100 persen. Ini menandakan bahwa belanja daerah di Kepenghuluan Kencana telah melebihi anggaran yang tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman atau hutang. Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima. Pada tahun 2021 perhitungan rasio efisiensi sebesar 90,73 persen dengan kriteria kurang efisien karena berada di antara 90 persen sampai 100 persen, ini berarti pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 17,27 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan secara metode value for money tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja yang telah dikeluarkan, yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara terus menerus. Pada tahun 2022 perhitungan rasio efisiensi sebesar 104 persen sehingga berada dalam kategori tidak efisien karena berada di atas 100 persen. Pada tahun 2022 ini juga menandakan bahwa belanja daerah di Kepenghuluan Kencana telah melebihi anggaran yang sudah tersedia sehingga pada pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman atau hutang. Dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 persen atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien. Temuan ini sejalan dengan pandangan Ardila dan Saragih (2024) yang menegaskan bahwa sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik akan sangat membantu manajemen dalam melakukan pengendalian internal dan pengambilan keputusan, termasuk dalam hal efisiensi belanja.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas di Kantor Desa Kepenghuluan Kencana selama 5 tahun terakhir yaitu untuk tingkat efektif pada rasio efektivitas tahun 2018 rasio perhitungannya yaitu sebesar 77,15 persen sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada di antara 60 persen sampai 80 persen. Hal ini disebabkan karena penetapan target yang terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah. Sehingga dapat mencerminkan bahwa dalam menetapkan target pada Pemerintah di Kepenghuluan Kencana belum memperhatikan potensi yang ada dan masih belum bisa diprediksi realisasi yang akan dicapai. Pada tahun 2019 perhitungan rasio efektivitas sebesar 72,12 persen sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada di antara 60 persen sampai 80 persen, pada rasio efektivitas tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,03 persen dari tahun 2018, hal ini dapat mengartikan bahwa pada Pemerintah Kepenghuluan Kencana dalam menentukan target pendapatannya belum sesuai, dan belum mampu merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan.

Pada tahun 2020 perhitungan rasio efektivitas sebesar 83,05 persen sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada di antara 80 persen sampai 90 persen. Artinya rasio efektivitas di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10,95 persen. Hal ini berarti dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Kepenghuluan Kencana belum sempurna dan belum sesuai dengan yang diinginkan. Dan pada pencapaian target Dana Desa yang ada menunjukkan bahwa belum efektif, karena Realisasi Dana Desa yang ada di Kepenghuluan Kencana sudah baik jika dibandingkan dengan Anggaran Dana Desa. Pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 84,14 persen sehingga termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada di antara 80 persen sampai 90 persen, pada tahun 2021 ini sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 1,09 persen. Ini menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang telah diprogramkan tidak sepenuhnya terealisasi dengan yang diharapkan. Pada tahun 2022 perhitungan rasio efektivitas sebesar 79,64 persen sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif karena berada di antara 60 persen sampai 80 persen, hal ini berarti pada rasio efektivitas tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 4,5 persen dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pendapatannya. Artinya, tingkat pencapaian hasil program terhadap tujuan yang ditetapkan tidak berjalan dengan baik. Ini terbukti dengan masih adanya kekurangan, seperti banyaknya proyek fisik dan bantuan untuk masyarakat tak dapat direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Temuan ini sejalan dengan pandangan Khairani et al. (2025) yang menekankan peran sentral sistem informasi akuntansi dalam tata kelola keuangan sektor publik, termasuk dalam hal pencapaian target pendapatan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Desa Kepenghuluan Kencana jika diukur dari rasio ekonomis tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada kategori kurang ekonomis, yaitu sebesar 73,02 persen, 69,17 persen, 83,09 persen, 78,55 persen, 80,15 persen karena berada di bawah rata-rata nilai persentase yang telah ditetapkan yaitu 100 persen ke atas. Hal ini dikarenakan dalam pengelolaan anggaran pemerintah desa belum sepenuhnya merealisasikan anggarannya untuk program atau kegiatan yang ingin dicapai, dan belum dapat menghindari pengeluaran yang boros.

Dilihat dari nilai rasio efisiensi pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada kategori kurang efisien, karena setiap tahunnya realisasi belanja lebih besar daripada realisasi pendapatan, hal ini menyebabkan secara metode value for money tidak dapat menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atas belanja yang telah dikeluarkan, yang berarti mengalami kerugian atau defisit secara terus menerus. Karena, suatu organisasi akan dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 persen atau semakin kecil rasio yang diperoleh, maka kinerjanya semakin efisien. Dilihat dari nilai rasio efektivitas pada Kantor Desa Kepenghuluan Kencana tahun 2018 sampai dengan 2022 berada pada kategori kurang efektif, karena berada di persentase 100 persen ke bawah. Ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan yang ada pada Kepenghuluan Kencana belum sepenuhnya tercapai dengan sempurna sehingga apa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa belum bisa dikatakan baik.

VI. REFERENSI

Anggraini, D. (2015). Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Pariaman. Jurnal KBP, 3(1), 47–60.

Ardila, I., & Saragih, S. O. (2024). Sistem informasi akuntansi dalam pengendalian internal penjualan kredit. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 4(2), 4008.

Bastian, I. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Salemba Empat.

Dahrani, & Basri, M. (2017). Debt to equity ratio dan longterm debt to equity ratio terhadap return on equity di Bursa Efek. Jurnal Riset Finansial Bisnis, 1(1), 65–78. https://doi.org/10.5281/zenodo.1048970

Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Model pengelolaan keuangan berbasis literasi keuangan dan inklusi keuangan: Studi pada UMKM di Kota Binjai. Owner, 6(2), 1509–1518. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.778

Diana, A., & Setiawati, L. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah. Andi Offset.

Fitriyani, F. (2013). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Sereang. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 2(1), 193–205.

Halim, A. (2015). Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan. UPP STIM YKPN.

Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.

Hanum, Z. (2011). Analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Serang Bedagai. Jurnal Ilmiah & Bisnis, 10(2), 1–23.

Hanum, Z., & Ritonga, P. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja kampus Islam swasta di Kota Medan. Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora, 1(1), 814–819.

Harahap, S. S. (2018). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada.

Januri. (2021). Peranan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi persediaan. Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, 1, 78–84.

Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Pertama, Cetakan Keduabelas). PT Raja Grafindo Persada.

Khairani, S., Yulanda, K., & Sari, E. N. (2025). Peran sistem informasi akuntansi dalam tata kelola keuangan di sektor publik. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 25(2).

Lesmana, S., Arfan, I., Noch, M. Y., & Ritonga, P. (2020). Teori Akuntansi. Mahendra.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Maith, H. A. (2013). Analisis value for money untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang. Universitas Brawijaya, 1(3), 619–628.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). CV Andi Offset.

Munawir, S. (2010). Analisis Laporan Keuangan (Edisi Keempat, Cetakan Kelima Belas). Liberty.

Nurafifah, I. P., Halilah, & Nirwana. (2022). Analisis pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan value for money (Studi kasus pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi), 2(2), 56–71.

Rambe, M. F. (2018). Pengantar Manajemen Keuangan. Citapustaka Media.

Ritonga, P. (2021). Keuangan Negara. UMSU Press.

Ritonga, P. (2022). Analisis laporan keuangan pada PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. Jurnal, 3(1), 520–531.

Sanjaya, S. (2021). Analisis akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya produksi pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional II. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.

Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, 16(1), 53–63.

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis struktur APBD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Sumatera Utara. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(2), 93–101. https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sukma, L. (2020). Teori Akuntansi. Mahendra.

Sululing, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018). Analisis laporan keuangan desa. Seminar Nasional Hasil Riset, 113, 1–10.

Sumpeno, W. (2011). Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Revisi). Read.

Timor, S. D., & Hanum, Z. (2023). Pengaruh etika profesi dan independensi auditor terhadap kinerja auditor dengan profesionalisme sebagai variabel intervening. Owner, 7(3), 2217–2224.